



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta No. 1 Kel. Harapan Mulya
Kec. Medan Satria - Bekasi Telp. : 8894728 Fax. : 8892080

Bekasi, 27 November 2023

Nomor : 070/11695/Dinkes.SDK
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Subkordinator Substansi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular
Di

Bekasi

Menindaklanjuti Surat Universitas Diponegoro, Nomor :
988/UN7.F7/PP/XI/2023, tanggal 10 November 2023 Hal Izin Penelitian,
disampaikan bahwa kami memberikan izin kepada :

Nama : Arisa Arta Nurulhuda
NIM : 14020120140167

Untuk melaksanakan Izin Pendahuluan, yang akan dilaksanakan pada
tanggal 05 Desember 2023 s.d 12 Desember 2023 di Substansi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota
Bekasi. Berkenaan dengan Pemberian Izin di atas, maka mahasiswa/I yang
bersangkutan diwajibkan menyampaikan hasil kegiatan tersebut berupa
laporan tertulis ke Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya, dan diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI



Ditandatangani Secara Elektronik,
KEPALA DINAS KESEHATAN

TANTI ROHILAWATI, SKM., M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641028 198803 2 006

Tembusan :
Yth, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro



PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN BEKASI UTARA

Jl. KH. Mochtar Tabrani No. 26 Telp./Fax. : (021) 88380176

BEKASI

Kode Pos 17122

Bekasi, 20 Maret 2024

Nomor : 070.1/ 260 /KcBU.TU
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
di –

Bekasi

Menindaklanjuti surat dari Universitas Diponegoro Nomor : 366/UN7.F7/PP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 Perihal : Surat Keterangan Permohonan Izin Penelitian dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa sebagai berikut :

Nama/ NIM : Arisa Arta Nurulhuda
Universitas/ Fakultas : Universitas Diponegoro/ Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : **" Implementasi Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Program PSN di Kecamatan Bekasi Utara "**
Keperluan : Melakukan Penelitian Pengambilan Data dengan Wawancara dalam rangka memenuhi persyaratan akademis.
No Handphone : 082111767875
Lokasi : Kantor Kecamatan Bekasi Utara

Sehubungan dengan tujuan tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memfasilitasi kegiatan yang dimaksud.

Demikian agar maklum.


SUMPONO BRAMA, S.STP., M.Si
Pembina Tk I/ IVb
NIP. 19800825 199912 1 001



PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN BEKASI UTARA
KELURAHAN TELUK PUCUNG

Jl. Perjuangan No. 4 Telp. (021) 89134725

BEKASI

Kode Pos 17121

Bekasi, 14 Maret 2024

Nomor : 100/181 -Kl.Tp/Set

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di-
BEKASI

Menindaklanjuti surat dari Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik nomor : 364/UN7.F7/PP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal : Permohonan Izin Penelitian, pada dasarnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa untuk Penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada staf Kelurahan Teluk Pucung di Instansi Kami dan yang bersangkutan harus mengikuti peraturan yang ada di lingkungan kerja, dengan nama tersebut adalah:

Nama : Arisa Arta Nurulhuda

NIM : 14020120140167

Judul : Implementasi Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Program PSN di Kecamatan Bekasi Utara.

No HP : 082111767875

Dengan ini kami memberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan yang bersangkutan untuk melaksanakan Penelitian di kantor Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Demikian agar menjadi maklum



Tembusan :
Yth, Camat Bekasi Utara.

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara di Dinas Kesehatan Kota Bekasi



(Wawancara pada 11 Desember 2023)



(Wawancara pada 15 Maret 2024)

2. Wawancara di Kecamatan Bekasi Utara dan Kelurahan Kaliabang Tengah



(Wawancara pada 03 April 2024)



(Wawancara pada 07 Maret 2024)

3. Wawancara di Kelurahan Teluk Pucung



(Wawancara pada 04 April 2024)

4. Wawancara di UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah dan UPTD Puskesmas Teluk Pucung



(Wawancara pada 21 Maret 2024)



(Wawancara pada 2 April 2024)

5. Wawancara Ketua RW dan Warga 022 Kelurahan Kaliabang Tengah



(Wawancara pada 16 April 2024)



(Wawancara pada 17 April 2024)

6. Wawancara Ketua RW dan Warga 09 Kelurahan Teluk Pucung



(Wawancara pada 6 April 2024)



(Wawancara pada 4 April 2024)

Lampiran 3 Interview Guide

INTERVIEW GUIDE

Kode Informan:

Informan 1	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Bekasi
Informan 2	:	Petugas lapangan Dinas Kesehatan Kota Bekasi
Informan 3	:	Puskesmas di Kecamatan Bekasi Utara
Informan 4	:	Perangkat Daerah di Kecamatan Bekasi Utara
Informan 5	:	Tokoh Masyarakat (Kepala RT/RW) di Kecamatan Bekasi Utara yang tercatat memiliki jumlah kasus DBD terbanyak
Informan 6	:	Masyarakat yang pernah terkena DBD di lingkungan Kecamatan Bekasi Utara

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan	Pihak
1.	Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan demam berdarah <i>dengue</i> (DBD) Di Kecamatan Bekasi Utara?	Ketepatan Kebijakan	7. Bagaimana pendapat perumus kebijakan dan agen pelaksana terhadap permasalahan DBD di Kota Bekasi terutama Kecamatan Bekasi Utara yang tercatat sebagai kecamatan yang kasus DBD nya tertinggi?	a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah
			8. Bagaimana respon dari perumus kebijakan dan agen pelaksana sewaktu dikeluarkan nya Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)?	
			9. Bagaimana keadaan sebelum dan sesudah kebijakan tersebut dikeluarkan? Apakah sudah dinilai tepat untuk memecahkan masalah DBD di Kecamatan Bekasi Utara?	a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas

			10. Apakah agen pelaksana telah menjalankan fungsinya sebagaimana terdapat dalam Instruksi Wali Kota Bekasi?	c. Perangkat Daerah
			11. Apakah kebijakan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sudah dirumuskan sesuai dengan karakter atau permasalahan DBD di Kecamatan Bekasi Utara?	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
		Ketepatan Pelaksana	1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam implementasi Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara?	
			2. Bagaimana peran pihak swasta dalam implementasi Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang	

			Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara?	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah d. Masyarakat
			3. Bagaimana peran masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam pengimplementasian Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara?	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah
			4. Apakah pembagian tugas serta wewenang pada agen pelaksana sudah sesuai dengan bidang masing-masing?	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah
		Ketepatan Target	1. Bagaimana kondisi target yang menjadi sasaran dalam pengimplementasian Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah

			Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara? Apakah siap untuk diintervensi?	
			2. Apakah sasaran kebijakan terhadap implementasi mengimplementasikan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 ini sudah sesuai yang direncanakan?	a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah
			3. Bagaimana tanggapan kelompok sasaran dalam mengimplementasikan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara?	a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah d. Masyarakat
			4. Apakah implementasi kebijakan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun	Dinas Kesehatan Kota Bekasi

			2019 ini bersifat baru atau memperbaharui kebijakan sebelumnya?	
		Ketepatan Lingkungan	1. Bagaimana interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan implementasi Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 penanggulangan DBD ? Apakah interaksinya sudah berjalan dengan baik? Jika belum, apa penyebabnya?	a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah d. Masyarakat
	2. Bagaimana pandangan kelompok sasaran terhadap implementasi Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara?			
	3. Bagaimana persepsi publik akan kebijakan tersebut? apakah mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan tersebut?			

		Ketepatan Proses	1. Bagaimana kesiapan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam upaya untuk mencapai standarisasi kebijakan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara?	
	2. Bagaimana kesiapan dari agen pelaksana dalam pengimplementasian kebijakan Instruksi Wali Kota Bekasi tersebut?		a. Puskesmas b. Perangkat Daerah	
	3. Bagaimana kesiapan masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam melaksanakan kebijakan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara?		a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah d. Masyarakat	
2.	Apa saja faktor pendukung dan faktor		1. Apakah dalam melaksanakan kebijakan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor :	

<p>penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan demam berdarah <i>dengue</i> (DBD) Di Kecamatan Bekasi Utara?</p>	Standar dan Sasaran Kebijakan	440/94/Dinkes Tahun 2019 ini memiliki ukuran dalam keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan?	<p>a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah</p>
		2. Apakah aturan tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan?	
	Sumber Daya	1. Bagaimana tanggapan pembuat kebijakan dan agen pelaksana terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan ini?	<p>a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah</p>
		2. Bagaimana kualitas sumber daya yang ada?	
		3. Bagaimana ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara?	
		4. Bagaimana tanggapan pembuat kebijakan dan agen pelaksana terkait penyediaan fasilitas	

			penunjang? Apakah fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini sudah mampu mendukung penerapan kebijakan tersebut?	
			5. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan DBD dan saat kegiatan PSN di lingkungan masyarakat?	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah d. Masyarakat
		Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Bagaimana kondisi struktur birokrasi (struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, koordinasi antar organisasi dan proses interaksi antar organisasi) Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam melaksanakan kebijakan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara?	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah
			2. Apakah SOP dalam implementasi kebijakan tersebut?	

			3. Apakah terdapat hambatan terkait hal tersebut?	
			4. Bagaimana fragmentasi (penyebaran tanggung jawab kepada bidang yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi) dalam pelaksanaan kebijakan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 di Kecamatan Bekasi Utara?	
		Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan- Kegiatan Pelaksanaan	1. Apa yang harus dilakukan para pelaksana dalam implementasi Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara?	a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah
			2. Bagaimana bentuk komunikasi antara Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan petugas lapangan tentang Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta	

			Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara?	a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah d. Masyarakat
			3. Bagaimana konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)?	
			4. Bagaimana bentuk kegiatan antara Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan agen pelaksana kebijakan dalam penanggulangan DBD?	
			5. Apakah mendapatkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?	
			6. Apa saja kendala yang dihadapi agen pelaksana dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat?	
		Disposisi atau Sikap	1. Bagaimana pemahaman Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan agen pelaksana terhadap kebijakan	a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas

		Para Pelaksana	Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019?	c. Perangkat Daerah
			2. Bagaimana respon dari agen pelaksana terhadap kebijakan penanggulangan DBD ini?	a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah
			3. Bagaimana komitmen para agen pelaksana terhadap kebijakan penanggulangan DBD dan Optimalisasi PSN di lingkungan masyarakat?	a. Puskesmas b. Perangkat Daerah c. Masyarakat
			4. Bagaimana persepsi dari agen pelaksana dari adanya kebijakan ini?	a. Puskesmas b. Perangkat Daerah
		Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik	1. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi pelaksanaan kebijakan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 440/94/Dinkes Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan DBD serta	a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah d. Masyarakat

			Optimalisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Bekasi Utara?	
			2. Bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik dan <i>stakeholder</i> mendukung pelaksanaan kebijakan?	
			3. Bagaimana sikap dan respon masyarakat saat petugas datang melakukan pengendalian dan penyuluhan?	a. Puskesmas b. Perangkat Daerah c. Masyarakat
			4. Sejauh mana kondisi sosial dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut?	a. Dinas Kesehatan b. Puskesmas c. Perangkat Daerah d. Masyarakat
			5. Bagaimana upaya penggalangan dukungan para kelompok kepentingan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi?	Dinas Kesehatan Kota Bekasi

			6. Apakah terdapat sumber-sumber ekonomi dalam organisasi pelaksana untuk mendukung implementasi kebijakan di Kecamatan Bekasi Utara?	a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Puskesmas c. Perangkat Daerah d. Masyarakat
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------